

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 mengakibatkan seluruh potensi-potensi ekonomi mengalami kemandegan dan diambang kebangkrutan. Salah satu sektor yang sangat mempengaruhi kegiatan sektor riil yaitu sektor jasa keuangan (perbankan) di Indonesia terpaksa ditutup atau dibekukan kegiatannya akibat ketidakmampuan bank tersebut dalam mengelola operasionalnya. Padahal, jumlah perbankan dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah banyak bermunculan di hampir setiap daerah.

Pada pertengahan tahun 1980-an berbagai macam deregulasi dikeluarkan oleh pemerintah untuk menggairahkan industri perbankan. Diawali dengan diluncurkannya Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (PAKTO) yang mencakup bidang keuangan, moneter dan perbankan. Kebijakan di bidang perbankan antara lain meliputi pemberian kemudahan-kemudahan dalam membuka kantor bank, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, memperkenankan pendirian bank-bank swasta baru antara lain dengan penetapan syarat modal disetor minimal Rp.10 milyar, juga memberikan kesempatan untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan modal minimum Rp.50 juta, dan memperlax persyaratan bagi bank menjadi bank devisa.

Bank adalah sebagai lembaga intermediasi antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, memerlukan kinerja keuangan yang sehat, sehingga fungsi intermediasi dapat berjalan lancar. Beberapa penelitian tentang perbandingan kinerja bank pada industri perbankan yang didasarkan pada rasio-rasio dari laporan keuangan perbankan pernah dilakukan sebelumnya. Antara lain adalah penelitian mengenai perbandingan tingkat efisiensi pada industri perbankan yang dilakukan dengan melakukan pengujian empiris terhadap tingkat efisiensi antara bank pemerintah, bank swasta nasional dan swasta asing serta bank publik. Rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian tersebut terdiri dari *Return on Assets*, *Profit Margin* dan *Return on Equity*.

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian di atas memiliki kandungan filosofis yang tinggi. Pengertian yang lebih teknis dapat ditemukan pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 792 Tahun 1990. Pengertian bank menurut PSAK Nomor 31 dalam Standar Akuntansi Keuangan (1999: 31.1) adalah: suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-

pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Sedangkan berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 792 tahun 1990 pengertian bank adalah suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang memiliki fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Dengan kata lain bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan menurut transaksinya bank dapat dibedakan menjadi Bank Devisa dan Bank Non Devisa. Bank Devisa adalah bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor dan impor, jual beli valuta asing, dll. Sedangkan Bank Non Devisa, adalah bank yang tidak dapat melakukan transaksi internasional atau dengan kata lain hanya dapat melakukan transaksi dalam negeri saja. (Irmayanto, 2002).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 1996) Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti

pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.

Menurut laporan Bank Indonesia, sejalan dengan kinerja ekonomi moneter yang relatif stabil, kinerja perbankan nasional dalam triwulan IV-2003 secara umum menunjukkan hasil yang positif. Kondisi kesehatan perbankan semakin membaik. Hal ini tercermin dari membaiknya beberapa indikator keuangan yang mempengaruhi kestabilan sistem perbankan dan keuangan seperti menguatnya struktur permodalan, menurunnya jumlah kredit bermasalah, dan meningkatnya profitabilitas.

Penelitian mengenai perbandingan kinerja industri perbankan pernah dilakukan pada bank devisa dan non devisa yang didasarkan pada *Return on Equity*, *Return on Assets* dan *Loan to Deposit Ratio*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja bank devisa dan non devisa sebelum krisis ekonomi. Dengan kata lain, bank devisa memiliki kinerja yang lebih baik daripada bank non devisa, (Wijaya, 1998).

Tulisan ini mencoba melihat perbedaan kinerja antara Bank Pemerintah dengan Bank Swasta (Non-Pemerintah) pada periode setelah krisis ekonomi, sedangkan pendekatan pengukuran kinerja yang digunakan adalah analisis CAMEL.

Rasio CAMEL sebagai *proxy* yang terdiri dari rasio *capital, assets, management, earnings, dan liquidity* Zainuddin dan Hartono (1999). Penelitian tersebut dilakukan terhadap seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Pengujian dilakukan terhadap rasio keuangan, baik pada tingkat individual maupun pada tingkat *construct* (gabungan dari rasio-rasio individual yang dijadikan satu variabel). Dengan menggunakan analisis regresi untuk menganalisis rasio keuangan pada tingkat individual dan *Analysis of Moment Structures (AMOS)* untuk menganalisis pada tingkat *construct*, penelitian ini menunjukkan bahwa secara individual rasio keuangan tidak signifikan dalam memprediksi perubahan laba. Akan tetapi, pada tingkat *construct* rasio keuangan *Capital, Assets, Earnings, dan Liquidity* signifikan dalam memprediksi perubahan laba.

Titik Aryati dan Hekinus Manao (2002) melakukan penelitian tentang rasio keuangan sebagai prediktor Bank Bermaslah di Indonesia. Rasio yang dilakukan dengan menggunakan CAMEL yang terdiri dari CAR, RORA, NPM, ROA, BOPO, LQ1 dan LQ2. Rasio CAMEL yang digunakan untuk menentukan apakah bank tersebut termasuk kategori sehat atau tidak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel yang signifikan pada alpha 5% untuk data lima tahun dari tahun 1993 sampai tahun 1997 adalah rasio CAR, RORA, ROA, LQ1 dan LQ2. Sedangkan variabel NPM dan BOPO tidak signifikan.

Bertolak kepada penelitian penelitian yang telah dilakukan, menarik untuk dilakukan penelitian tentang kinerja bank dengan judul Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan tingkat kinerja bank devisa dan bank non devisa yang diukur menurut rasio CAMEL?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan tingkat kinerja bank bank devisa dan bank non devisa yang diukur menurut rasio CAMEL.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Bagi Peneliti

Merupakan salah satu sarana untuk dapat menerapkan dan mengimplementasikan ilmu yang sudah diperoleh selama masa perkuliahan.

1.4.2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan untuk menetapkan kebijakan di bidang keuangan.

1.4.3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan pilihan bank yang tepat sebagai pemediasi pihak yang memiliki kelebihan keuangan dengan pihak yang membutuhkan dana. Dengan penetapan bank devisa dan non devisa diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi keuangan suatu bank.

;

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Landasan Hukum Perbankan di Indonesia

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Landasan hukum perbankan di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Serta Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pengertian bank adalah

sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian di atas memiliki kandungan filosofis yang tinggi. Pengertian yang lebih teknis dapat ditemukan pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 792 Tahun 1990. Pengertian bank menurut PSAK Nomor 31 dalam Standar Akuntansi Keuangan (2002: 31.1) adalah: suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Sedangkan berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 792 tahun 1990 pengertian bank adalah suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang memiliki fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Dengan kata lain bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut kepemilikannya bank dapat dibedakan menjadi bank pemerintah dan bank swasta. Bank pemerintah merupakan perusahaan

perbankan yang sahamnya dimiliki pemerintah. Sedangkan bank swasta merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan swasta. Perbankan swasta juga dibedakan perbankan swasta nasional dan swasta asing.

2.2. Krisis Perbankan

Industri perbankan oleh beberapa ahli ekonomi dianggap sebagai industri yang memerlukan perhatian khusus karena dianggap mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal perbankan dan merupakan bagian integral dari sistem pembayaran. Sifat perbankan yang merupakan bagian dari sistem pembayaran tersebut mengakibatkan timbulnya pandangan bahwa permasalahan di industri perbankan dapat menyebabkan efek negatif terhadap perekonomian yang dampaknya jauh lebih besar daripada efek negatif karena kejatuhan suatu perusahaan biasa. Dalam hal ini, kekhawatiran yang timbul adalah efek bola salju dari kejatuhan suatu bank yang menyebabkan jatuhnya bank dan perusahaan-perusahaan lain yang memiliki hubungan bisnis dengan bank tersebut.

Beberapa analis mengutarakan alasan-alasan yang mendukung pernyataan bahwa industri perbankan sebagai industri memerlukan perhatian khusus. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah bahwa industri perbankan memiliki (Hadad et.al: TT):

1. Rasio kas terhadap aset yang rendah;
2. Rasio modal terhadap aset yang rendah; dan
3. Rasio dana jangka pendek terhadap total deposit yang tinggi.

Dengan memperhatikan kondisi di atas, penarikan dana dalam skala besar yang terjadi dalam waktu singkat akan menyebabkan timbulnya permasalahan likuiditas pada industri perbankan yang kemudian akan mendorong bank-bank untuk menggunakan segala cara yang mungkin dilakukan guna memenuhi penarikan dana oleh masyarakat, termasuk di dalamnya upaya untuk menjual asset yang ada dengan harga murah. Kondisi ini menimbulkan *distress* pada sistem perbankan dan membawa dampak lanjutan pada penurunan rentabilitas yang pada akhirnya menuju pada kondisi *insolvent*. Terjadinya krisis perbankan diberbagai negara, terutama di kawasan Asia, telah mendorong para peneliti untuk melakukan kajian mengenai hal-hal yang dapat dijadikan informasi awal munculnya krisis atau tekanan negatif di industri perbankan. Kunt & Detragiache (1998 dalam Hadad et.al: TT) mendefinisikan krisis sebagai suatu keadaan dimana salah satu kondisi berikut terpenuhi:

1. Asset *non performing* mencapai 10% dari total asset sistem perbankan;
2. Biaya untuk menyelamatkan sistem perbankan mencapai 2% dari PDB;
3. Terjadi pengalihan kepemilikan bank-bank secara besar-besaran kepada pemerintah; dan
4. Terjadi "*bank-run*" yang meluas atau terdapat tindakan darurat yang dilakukan pemerintah dalam bentuk pembekuan simpanan masyarakat, penutupan kantor-kantor bank dalam jangka waktu yang cukup panjang, atau pemberlakuan penjaminan simpanan yang menyeluruh.

Pada dasarnya permasalahan yang ada di industri perbankan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu "*severe distress*" dan "*full-blown crisis*". *Severe distress* atau permasalahan berat terjadi apabila permasalahan perbankan telah terakumulasi hingga mencapai titik tertentu, namun belum sampai pada salah satu kondisi yang didefinisikan oleh Kunt & Detragiache (1998 dalam Hadad et.al: TI) di atas. Sementara itu, *full-blown crisis* terjadi apabila salah satu kondisi diatas telah terpenuhi. Lebih lanjut Hardy & Pazarbasioglu mengatakan bahwa krisis atau permasalahan berat pada industri perbankan dapat bersumber dari sektor riil, internal sektor perbankan, dan perubahan drastis pada indikator ekonomi tertentu yang dalam hal ini antara lain ditunjukkan dengan penurunan drastis pada pertumbuhan PDB riil, peningkatan suku bunga riil, penurunan ICOR, depresiasi tajam pada nilai tukar, dan peningkatan tajam pada inflasi, ekspansi kredit, maupun capital inflow. Hal serupa juga diungkapkan para ahli bahwa krisis perbankan cenderung timbul pada saat kondisi makroekonomi memburuk. Dalam hal ini, pertumbuhan PDB yang rendah sangat berkaitan dengan peningkatan risiko pada industri perbankan. Selain itu, peningkatan risiko pada industri perbankan juga dapat berasal dari laju inflasi yang tinggi dan upaya stabilisasi laju inflasi akan mengakibatkan peningkatan tajam pada suku bunga riil yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan terjadinya krisis perbankan.

Faktor-faktor tertentu yang secara khusus mempengaruhi krisis di kawasan Asia adalah apresiasi nilai tukar yang diikuti dengan depresiasi yang sangat tajam serta peningkatan tajam utang luar negeri perbankan yang diikuti

dengan tingginya *event-of-default*. Selanjutnya, permasalahan yang cukup berat (namun belum sampai pada tahap krisis) pada industri perbankan pada umumnya berasal dari faktor-faktor domestik seperti ekspansi kredit yang berlebihan pada sektor konsumtif dan fluktuasi suku bunga riil simpanan masyarakat. Sementara itu, permasalahan perbankan yang menuju pada krisis umumnya disebabkan oleh ekspansi kredit yang berlebihan yang bersumber dari utang luar negeri dan fluktuasi tajam pada *real effective exchange rate*.

2.3. Struktur Kepemilikan Bank Di Indonesia

Kajian mengenai struktur kepemilikan sangat menarik untuk dilihat lebih mendalam lagi mengingat adanya suatu opini yang menyebutkan bahwa kinerja suatu bank akan dipengaruhi oleh siapa yang menjadi pemilik di belakang bank tersebut. Hal ini sangat beralasan karena pemilik memiliki kewenangan yang besar untuk memilih siapa-siapa yang akan duduk dalam manajemen yang selanjutnya akan menentukan arah kebijakan bank tersebut ke depan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Barth, Caprio Jr dan Levine (2002 dalam Hadad et.al: 11) dengan menggunakan data dari 60 negara antara lain menyimpulkan bahwa kepemilikan bank oleh lembaga non keuangan tidak memiliki hubungan dengan kinerja bank tersebut. Selanjutnya kepemilikan bank yang semakin besar oleh pemerintah cenderung mengalami perkembangan kinerja yang melambat. Untuk kasus di Indonesia masih perlu di uji terlebih dahulu apakah kinerja bank-bank yang ada sekarang dipengaruhi oleh latar belakang siapa yang menjadi pemilik bank tersebut.

Kinerja suatu bank sangat erat sekali hubungannya dengan peran dan fungsi manajemen dari bank tersebut. Keberhasilan suatu bank untuk dapat menghasilkan suatu keuntungan merupakan suatu prestasi yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam mengelola banknya secara baik dan benar. Dengan demikian maju tidaknya kegiatan operasional suatu bank sangat tergantung dengan kemampuan dari manajemen tersebut mengelola banknya masing-masing. Di samping besarnya peran manajemen dalam mengelola bank agar dapat menghasilkan kinerja yang baik, peran dari pemilik bank itu sendiri juga cukup besar untuk memberikan kontribusi dalam memilih manajemen yang bagus. Pemilik suatu bank seperti halnya pemilik usaha lainnya maupun investor senantiasa berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan meminimalkan risiko usaha yang sekecil mungkin (*risk-averse*).

Pemilik suatu bank menginginkan manajemen dari banknya dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada pada bank tersebut sehingga manajemen mampu menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan akhir dari pengelolaan bank adalah profit yang tercermin dengan adanya kinerja yang bagus dari bank tersebut. Untuk mencapai tujuan yang bersifat *profit motives* dari pemegang saham atau pemilik bank tersebut, maka pemilik bank senantiasa akan memilih manajemen yang diharapkan mampu menjalankan usaha bank tersebut dengan baik dan menguntungkan. Secara umum pemilik bank tidak akan memilih manajemen yang diperkirakan akan merugikan banknya. Oleh sebab itu, dalam hubungan antara pemilik bank dengan manajemen selalu ada "*performance contract*" di mana pemilik bank

mempersyaratkan manajemen yang dipilih oleh pemilik untuk memaksimalkan keuntungan untuk kepentingan pemilik bank tersebut.

Mengingat pentingnya hubungan antara pemilik dengan manajemen suatu bank maka perlu dilihat lebih mendalam lagi bagaimana hubungan tersebut apabila pemilik bank tersebut beragam jenis dan latar belakangnya. Dengan kepemilikan bank yang cukup beragam jenisnya baik itu pemerintah, swasta maupun asing, perlu dilihat lebih jauh lagi pengaruhnya terhadap kinerja masing-masing bank. Apakah terjadi perbedaan kinerja untuk bank yang dimiliki oleh jenis pemegang saham yang berbeda sehingga kita akhirnya dapat menarik suatu kesimpulan bahwa kepemilikan suatu bank oleh kelompok tertentu atau dimiliki oleh jenis pemegang saham tertentu akan memiliki kinerja yang lebih baik dari kelompok bank lainnya. Asumsi lain yang ditarik dari hubungan tersebut adalah mungkin saja struktur kepemilikan suatu bank tidak terkait sama sekali dengan kinerja bank tersebut. Asumsi-asumsi tersebut tentunya perlu dipertdalam lebih lanjut dengan suatu penelitian yang mendalam dengan menggunakan data-data yang bersifat empiris sehingga asumsi tersebut telah diuji dengan fakta-fakta di lapangan.

Dalam mengkaitkan antara struktur kepemilikan dengan kinerja bank, terdapat satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian sasaran organisasi bank serta kinerjanya, yaitu manajemen atau pengurus bank. Pencapaian tujuan dan kinerja bank tidak terlepas dari kinerja manajemen itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, hubungan antara manajemen suatu bank dengan pemilik bank akan diuraikan dalam suatu kontrak (*performance*

bank yang ada ternyata kepemilikannya tersebar. Sebagian kecil dari jumlah kepemilikan bank-bank di Indonesia sangat bervariasi karena dari 141

berbeda dengan keinginan pemilik.

kesjahteraan pemilik, walaupun keputusan manajemen dalam praktik akan adanya *monitoring cost* tersebut manajemen akan senantiasa memaksimalkan mengeluarkan biaya *monitoring* dalam bentuk gaji dan emolument. Dengan pemilik dapat menetapkan insentif yang sesuai bagi manajemen, yaitu dengan jangka panjang. Untuk membatasi atau mengurangi kemungkinan tersebut, untuk jangka pendek dengan mengabaikan *sustainability* keuntungan dalam jangka pendek sehingga terkadang mereka cenderung memaksimalkan profit *welfare motives* yang bersifat jangka panjang, sebaliknya manajemen lebih berstat pemilik. Hal ini sangat berlawanan sekali karena pada umumnya pemilik memiliki berlawanan apabila manajemen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan Bila kedua pihak memaksimalkan perannya (*utility maximizers*), cukup

daya yang ada di bank tersebut secara maksimal (Hadad et al: TT).

manajemen diharapkan oleh pemilik untuk mampu mengoptimalkan sumber pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini beberapa pekerjaan atas nama pemilik. Pekerjaan tersebut termasuk lainnya (disebut agen atau pengurus atau manajemen) untuk melakukan orang (disebut *owners* atau pemegang saham atau pemilik) menunjuk seorang *Agency relationship* didefinisikan sebagai kontrak dimana satu atau lebih

dengan *Agency Theory* (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Hadad et al: T1)

contract). Hubungan kontrak antara pemilik dan manajemen tersebut sejalan

bank yang ada dimiliki oleh pemerintah, sebagian lagi dimiliki oleh pihak swasta baik swasta domestik maupun swasta asing. Peta struktur kepemilikan bank saat ini adalah sebagai berikut: (Booklet Perbankan Indonesia 2004)

1. Bank Pemerintah Pusat terdapat 5 Bank
2. Bank Pemerintah Daerah 26 Bank
3. Bank Swasta Nasional 76 Bank
4. Bank Asing 10 Bank
5. Bank Campuran (Swasta Nasional dan Asing) 24 Bank.

2.4. Laporan Keuangan

2.4.1. Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai suatu komoditi, laporan keuangan yang dihasilkan sendiri oleh manajemen, yang kegunaannya akan dikonsumsi oleh banyak pihak, maka laporan keuangan harus disajikan dengan cara-cara dan prosedur-prosedur tertentu berdasarkan suatu pedoman yang berlaku. Dengan demikian penyajian laporan keuangan tidak bisa secara operasional tanpa mengikuti aturan tersebut. Suatu penyelenggaraan sistem adanya catatan akuntansi harus mencakup keseluruhan aktifitas yang dibutuhkan untuk memberikan kepada manajemen berbagai macam informasi untuk perencanaan, pengendalian dan pelaporan keadaan serta operasi perusahaan.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah suatu rangkuman dari keseluruhan aktifitas yang dapat menaikkan ataupun menurunkan berbagai aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan selama suatu periode tertentu. Proses

penyajian terdiri dari dua tahap. Tahap pertama disebut tahap pencatatan (*recording phase*) sedangkan tahap kedua adalah tahap pengikhtisaran (*summmarizing phase*).

Masing-masing tahap saling berkaitan dan tidak bisa saling mendahului karena tidak mungkin laporan keuangan disusun tanpa adanya suatu aktifitas. Tahap-tahap ini yang dikenal dengan istilah proses akuntansi atau siklus akuntansi. Pada tahap pencatatan, ada tiga langkah yang dijalani, yaitu:

1. Analisis atau transaksi dan kejadian-kejadian terpilih lainnya tidak semua transaksi akan dicatat, namun harus dilakukan seleksi terhadap suatu kejadian, apakah akan diakui dalam laporan keuangan atau tidak. Setelah itu transaksi terpilih tersebut didokumentasikan, akan dijadikan dasar pembuatan catatan asli dari setiap transaksi.
2. Pencatatan transaksi. Dengan berdasarkan dokumen-dokumen di atas, masing-masing transaksi dicatat secara berurutan (kronologis) di dalam buku harian. Buku harian yang digunakan dapat memakai buku harian khusus atau buku harian umum.
3. Pemindahan transaksi ke dalam buku besar. Setelah masing-masing transaksi dicatat dalam buku harian, selanjutnya dimasukkan ke dalam akun-akun yang sesuai pada buku besar dan buku tambahan.

Selanjutnya, pada tahap pengikhtisaran, rangkaian langkah yang dilakukan adalah:

1. Pembuatan neraca sisa dari akun-akun buku besar. Neraca sisa menyajikan suatu ringkasan informasi yang diklasifikasikan dalam

buku besar, dan juga merupakan suatu pengkoreksian umum atas keakuratan pencatatan dan pemindahan ke buku besar.

2. Penyesuaian atas beberapa akun-akun agar sesuai dengan tanggal bersangkutan. Sebelum laporan keuangan dapat disusun semua informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan belum tercatat mesti ditetapkan. Penyesuaian harus dibukukan (pada kertas kerja) sehingga akun-akun akan sudah sesuai dengan keadaan saat bersangkutan sebelum penyusunan laporan keuangan dilaksanakan.
3. Penyusunan laporan keuangan Informasi mengenai ikhtisar kegiatan pada kertas kerja termasuk perubahan-perubahan dalam posisi keuangan akan menjadi dasar disusunnya laporan keuangan untuk periode berjalan.
4. Penutupan akun-akun yang bersifat sementara. Seluruh saldo-saldo akun persediaan (bila perusahaan menggunakan sistem persediaan periodik, ditutup akun-akun ikhtisaran yang bersangkutan dan selanjutnya dipindahkan ke akun kekayaan pemilik.
5. Pembuatan neraca sisa setelah penutup. Dilakukan untuk menetapkan kesamaan antara debit dan kredit setelah pembukuan ayat-ayat penyesuaian dan penutup.
6. Pembalikan akun-akun tertentu. Langkah ini tidak harus ditempuh, namun kerap kali diperlukan sebagai suatu cara untuk memudahkan pencatatan dan penyesuaian pada periode selanjutnya. Adapun akun-

akun yang memerlukan langkah pembalikan ini adalah akun-akun ditangguhkan (*deferred item*) dan akun-akun antisipasi (*accured item*).

Prosedur-prosedur ini merupakan suatu siklus lengkap yang lazimnya dilaksanakan dalam setiap periode fiskal.

2.4.2. Isi Laporan Keuangan

Sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 27/119/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 laporan keuangan bank terdiri dari (i) neraca, (ii) laporan komitmen dan kontijensi, (iii) laporan laba/rugi, (iv) laporan arus kas, dan (v) catatan atas laporan keuangan.

1. Neraca

Dalam penyajiannya, aktiva dan kewajiban dalam neraca bank tidak dikelompokkan menurut lancar atau tidak lancar, namun sedapat mungkin tetap disusun menurut tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Setiap aktiva produktif disajikan di neraca sebesar jumlah bruto dari tagihan atau penempatan bank dikurangi dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari masing-masing aktiva produktif yang bersangkutan.

2. Laporan Komitmen dan Kontijensi

Laporan ini wajib disajikan secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi komitmen dan kontijensi, baik yang bersifat tagihan maupun kewajiban pada tanggal laporan. Komitmen adalah suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak

dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Kontijensi adalah tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

3. Laporan Laba/Rugi

Perhitungan laba/rugi bank wajib disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Laporan laba/rugi bank disusun dalam bentuk berjenjang (*multiple step*) yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya. Cara penyajian laporan laba/rugi bank antara lain wajib memuat secara rinci unsur pendapatan dan beban, unsur pendapatan dan beban harus dibedakan antara pendapatan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non operasional.

4. Laporan Arus Kas

Laporan ini harus disusun berdasarkan kas selama periode laporan dan harus menunjukkan semua aspek penting dari kegiatan bank tanpa memandang apakah transaksi tersebut berpengaruh langsung pada kas.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Di samping hal-hal yang wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam standar akuntansi

keuangan, bank juga wajib mengungkapkan dalam catatan tersendiri mengenai posisi devisa netto menurut jenis mata uang serta aktifitas-aktifitas lain seperti kegiatan wali amanat, penitipan harta dan penyaluran kredit pengelolaan.

2.5. Kinerja Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 1996) Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.

Kinerja keuangan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena kinerja keuangan merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja keuangan adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. Tingkat Kinerja keuangan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank melalui penilaian faktor

permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

2.6. Penilaian Kinerja Keuangan Bank

2.6.1. Tujuan

Penilaian tingkat kinerja keuangan bank dimaksudkan sebagai berikut:

1. Tolok ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tolok ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan.

2.6.2. Sistem Penilaian

Pada dasarnya kinerja keuangan bank dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, yang meliputi aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Rentabilitas dan Likuiditas (CAMEL).

1. Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian kinerja Bank Umum meliputi pelanggaran dan atau pelampauan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta

pelanggaran ketentuan PDN sebagai faktor pengurang dalam kinerja, sedangkan pada BPR hanya pelanggaran ketentuan BMPK.

2. Faktor-faktor yang dapat menggugurkan penilaian kinerja bank menjadi Tidak Sehat yaitu perselisihan intern, campur tangan pihak di luar manajemen bank, window dressing, praktek bank dalam bank, penghentian keikutsertaan kliring, praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.
3. Untuk masa mendatang, kinerja bank lebih diarahkan sebagai supervisory tools bagi BI dan penetapan action plan dalam rangka identifikasi dan pemecahan permasalahan pada aspek tertentu bank. Faktor penilaian dalam menentukan kinerja bank akan pula memasukkan unsur sensitivity to market risk.

2.7. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu perlu dikemukakan sebagai dasar atau landasan berfikir agar logis dan berkesinambungan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian mengenai perbandingan kinerja industri perbankan pernah dilakukan pada bank devisa dan non devisa yang didasarkan pada *Return on Equity*, *Return on Assets* dan *Loan to Deposit Ratio*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja bank devisa dan non devisa sebelum krisis ekonomi. Dengan kata lain, bank devisa memiliki kinerja yang lebih baik daripada bank non devisa, (Wijaya, 1998). Tulisan ini mencoba melihat perbedaan kinerja antara Bank Pemerintah

dengan Bank Swasta (Non-Pemerintah) pada periode setelah krisis ekonomi, sedangkan pendekatan pengukuran kinerja yang digunakan adalah analisis CAMEL.

Rasio CAMEL sebagai *proxy* yang terdiri dari rasio *capital, assets, management, earnings, dan liquidity*. rasio CAMEL. Zainuddin dan Hartono (1999) menguji kegunaan rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba yang didasarkan pada rasio CAMEL (*Capital, Assets, Managements, Earnings, Liquidity*). Penelitian tersebut dilakukan terhadap seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Pengujian dilakukan terhadap rasio keuangan, baik pada tingkat individual maupun pada tingkat *construct* (gabungan dari rasio-rasio individual yang dijadikan satu variabel). Dengan menggunakan analisis regresi untuk menganalisis rasio keuangan pada tingkat individual dan *Analysis of Moment Structures (AMOS)* untuk menganalisis pada tingkat *construct*, penelitian ini menunjukkan bahwa secara individual rasio keuangan tidak signifikan dalam memprediksi perubahan laba. Akan tetapi, pada tingkat *construct* rasio keuangan *Capital, Assets, Earnings, dan Liquidity* signifikan dalam memprediksi perubahan laba.

Titik Aryati dan Hekinus Manao (2002) melakukan penelitian tentang rasio keuangan sebagai prediktor Bank Bermasalah di Indonesia. Rasio yang dilakukan dengan menggunakan CAMEL yang terdiri dari CAR, RORA, NPM, ROA, BOPO, LQ1 dan LQ2. Rasio CAMEL yang digunakan untuk menentukan apakah bank tersebut termasuk kategori sehat atau tidak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel yang signifikan pada alpha 5% untuk data lima

tahun dari tahun 1993 sampai tahun 1997 adalah rasio CAR, RORA, ROA, LQ1 dan LQ2. Sedangkan variabel NPM dan BOPO tidak signifikan.

Dengan melihat hasil penelitian tersebut, maka penelitian ini tidak sepenuhnya mereffikasi penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini proxy dari rasio CAMEL digunakan untuk menentukan tingkat kinerja bank pemerintah dan non pemerintah atau swasta. Sehingga diharapkan menambah wacana penelitian perbankan.

2.8. Hipotesis

Penelitian ini akan memperdalam kembali fungsi rasio-rasio yang termasuk dalam CAMEL sebagai penentu kinerja keuangan perbankan. Seperti penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas secara individual rasio keuangan tidak signifikan dalam memprediksi perubahan laba. Akan tetapi, pada tingkat *construct* rasio keuangan *Capital, Assets, Earnings, dan Liquidity* signifikan dalam memprediksi perubahan laba.

Bank devisa merupakan bank yang telah mempunyai izin untuk melakukan transaksi yang berhubungan dengan perdagangan luar negeri, ekspor impor, oleh karena itu, perbankan yang termasuk bank devisa dapat memanfaatkan mata uang asing sebagai alat untuk memperkuat struktur permodalan. Penelitian yang dilakukan oleh Febryani dan Zulfadin (2003) yang menemukan adanya perbedaan kinerja yang cukup signifikan antara bank devisa dan non devisa. Sehingga hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H_{1a.1} = Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) bank devisa dan non devisa.

H_{1a.2} = Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Return on Risk Assets* (RORA) bank devisa dan non devisa.

H_{1a.3} = Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Net Profit Margin* (NPM) bank devisa dan non devisa.

H_{1a.4} = Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Return On Assts* (ROA) bank devisa dan non devisa.

Keempat rasio di atas berhubungan langsung dengan aset dan permodalan perbankan. Kemudian pengukuran kinerja yang berhubungan dengan operasional perusahaan perbankan yang menyakut kemampuan memperoleh laba Zainuddin dan Hartono (1999) menemukan bahwa pertumbuhan laba perusahaan perbankan sangat dipengaruhi oleh banyak hal termasuk kondisi perekonomian. Oleh karena itu, jika ekspor perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat menembus pasaran dunia dengan baik, tentu akan berakibat pada tingkat keuntungan yang tinggi bagi perbankan yang termasuk dalam bank devisa dalam menghasilkan keuntungan, karena terdapat biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh pengeksport maupun pengimpor ketika melakukan transaksi menggunakan bank tersebut. Sehingga hipotesis selanjutnya ditetapkan:

H_{1a.5} = Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) bank devisa dan non devisa.

Ha. 6 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio kewajiban bersih *call money* terhadap aktiva lancar (LQ₁) bank devisa dan non devisa.

Ha. 7 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio kredit terhadap daya yang diterima (LQ₂) bank devisa dan non devisa.